

LAPORAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA WANOGARA WETAN :
UPAYA MENINGKATKAN PERAN SERTA WARGA MENUJU
MASYARAKAT MADANI”**



Disusun Oleh:

ENDRO TRI SUSDARWONO, S.Pd.,S.H.,M.Si

NIDN: 0617098202

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM)**

UNIVERSITAS PERADABAN

2019

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tak henti kami panjatkan kepada Allah SWT, maha segala dan pemberi nikmat ke sekalian Alam, atas berkat Rahmat dan anugerahNya telah memberikan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Desa Wanogara Wetan : Upaya Meningkatkan Peran Serta Warga Menuju Masyarakat Madani” sebagai bukti pengalaman dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terlaksana dengan baik dan berhasil atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Yahya A. Muhaimin selaku Rektor Universitas peradaban
2. Segenap perangkat desa Pemerintahan Desa Wanogara Wetan, Ketua Karang Taruna Desa Wanogara Wetan, dan Pokdarwis Desa Wanogara Wetan
3. Segenap Bapak/Ibu Dosen Universitas peradaban

Semoga segala bantuan dan perhatian Bapak/Ibu sekalian menjadi Amal saleh dan dapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Bumiayu, 10 April 2019

Penulis

LEMBAR PENGESAHAN

1. **Judul kegiatan** : Pemberdayaan Masyarakat Desa Wanogara Wetan : Upaya Meningkatkan Peran Serta Warga Menuju Masyarakat Madani
2. **Pengusul** :
- Nama** : Endro Tri Susdarwono, S.Pd., S.H., M.Si
- NIDN** : 0617098202
- Jabatan Fungsional** : -
- Program Studi** : Ilmu Komunikasi
- Perguruan Tinggi** : Universitas Peradaban
- Bidang Keahlian** : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Alamat Kantor** : Jl. Raya Pagojengan KM. 3 Paguyangan Brebes

Humiayu, 7 November 2019

Mengetahui

Ketua LPPM Universitas Peradaban

Umi Chabibatus zahro, M.Pd

NIPY. 14.01.080

Pengusul

Endro Tri Susdarwono, S.Pd., S.H., M.Si

NIDN. 0617098202

**SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Nidzomuddin, S.Sos.

Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan Universitas Peradaban

Telah Menerima Laporan Pengabdian Masyarakat berjudul :

“Pemberdayaan Masyarakat Desa Wanogara Wetan : Upaya Meningkatkan Peran Serta Warga Menuju Masyarakat Madani”

Dari penulis :

Nama : Endro Tri Susdarwono, S.Pd., S.H., M.Si.

NIDN : 0617098202

Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar

Unit Kerja : FISIP Universitas Peradaban

Untuk dipublikasikan di Perpustakaan Universitas Peradaban.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti laporan akhir pengabdian kepada masyarakat.

Bumiayu, 11 November 2019

Kepala UPT Perpustakaan

Universitas Peradaban



M. Nidzomuddin, S.Sos.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Publikasi	iii
Daftar Isi	iv
BAB I Pendahuluan	1
A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	1
B. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	3
C. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	4
D. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	5
BAB II Deskripsi Lokasi Pemberdayaan Masyarakat	7
A. Desa Wanogara Wetan	7
B. Batas Wilayah Desa Wanogara Wetan	7
C. Pembagian Wilayah Desa Wanogara Wetan	7
BAB III Pelaksanaan Kegiatan	8
A. Pendahuluan Tentang Pemahaman Pemberdayaan Masyarakat	8
B. Pemberdayaan Masyarakat Tentang Peningkatan Minat Baca	10
C. Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	14
D. Pemberdayaan Masyarakat Tentang Potensi Hasil Desa	18
E. Pemberdayaan Masyarakat Tentang Potensi Desa Wisata	24
BAB IV Penutup	31
A. Kesimpulan	31
B. Saran	31
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Disini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat atau objek saja.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

1. **Enabling**, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. **Empowering**, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan.
3. **Protecting**, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan (Najati dkk, 2005:54). Adapun penjelasan terhadap prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses

pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (the have not), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the have little). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

B. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

1. **Perbaiki kelembagaan (better institution).** Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
2. **Perbaiki usaha (better business).** Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnisitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

3. **Perbaiki pendapatan (better income).** Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
4. **Perbaiki lingkungan (better environment).** Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
5. **Perbaiki kehidupan (better living).** Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
6. **Perbaiki masyarakat (better community).** Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

C. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat tiga strategi utama pemberdayaan masyarakat dalam praktik perubahan sosial, yaitu tradisional, direct action (aksi langsung), dan transformasi yang dijelaskan sebagai berikut (Hikmat, 2006):

1. **Strategi tradisional.** Strategi ini menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.
2. **Strategi direct-action.** Strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.

3. **Strategi transformatif.** Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

D. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut (Soekanto, 1987:63):

1. **Tahap Persiapan.** Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
2. **Tahapan pengkajian (assessment).** Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (feel needs) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
3. **Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan.** Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (exchange agent) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
4. **Tahap pemformalisasi rencanaaksi.** Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

5. **Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan.** Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan.
6. **Tahap evaluasi.** Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
7. **Tahap terminasi.** Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

BAB II

DESKRIPSI LOKASI PENGABDIAN MASYARAKAT

A. Desa Wanogara Wetan, Rembang, Purbalingga

Desa Wanogara Wetan adalah desa di kecamatan Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini berjarak sekitar 4,6 Km dari ibu kota kecamatan ke arah selatan atau 25 Km dari ibu kota Kabupaten Purbalingga.

B. Batas wilayah Desa Wanogara Wetan

Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Utara	Desa Makam dan Desa Bodas Karangjati
Timur	Desa Bodas Karangjati dan Desa Bantarbarang
Selatan	Desa Wlahar
Barat	Desa Wanogara Kulon

C. Pembagian wilayah Desa Wanogara Wetan

1. Dusun Dukuh
2. Dusun Gunung
3. Dusun Genting
4. Dusun Legok
5. Dusun Pagentan



Selanjutnya, di bidang pemanfaatan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat harus mampu menyediakan seperangkat teknologi tepat guna sesuai potensi lokal, penyediaan pasar bagi terciptanya aktifitas ekonomi masyarakat serta fasilitas kelompok pengelola prasarana. Untuk melaksanakan semua kebijakan pemberdayaan masyarakat tersebut, faktor utama yang harus dilaksanakan yakni melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui pengkajian dan pengembangan dengan tetap menjunjung tinggi pendekatan operasional sesuai konsep pembangunan daerah.

Dan jenis-jenis dan bentuk-bentuk partisipasi antara lain:

1. Partisipasi dengan pemikiran (*Psychological Participation*)
2. Partisipasi dengan tenaga (*Physical Participation*)
3. Partisipasi dengan pikiran dan tenaga atau partisipasi aktif (*aktif Participation*)
4. Partisipasi dengan keahlian (*With Skill Participation*)

5. Partisipasi dengan barang (*Material Partisipation*)
6. Partisipasi dengan uang (*money Partisipation*)
7. Partisipasi dengan jasa (*service Partisipation*)
8. Bentuk konsultasi
9. Bentuk sumbangan spontan berupa barang/jasa
10. Bentuk sumbangan dari luar dalam bentuk Proyek yang bersifat berdikari
11. Bentuk proyek yang dibiayai oleh komite setelah ada *consensus* dalam rapat komunity
12. Bentuk sumbangan dalam bentuk jasa kerja
13. Bentuk aksi missal mengerjakan proyek secara sukarela
14. Bentuk mengadakan perjanjian bersama untuk bekerjasama
15. Bentuk melakukan pembangunan dalam lingkungan keluarga
16. Bentuk pembangunan proyek komuniti yang otonom.

B. Pemberdayaan Masyarakat Tentang Peningkatan Minat Baca

Kurangnya minat baca masyarakat Desa Wanogara Wetan serta tidak adanya fasilitas seperti perpustakaan desa atau taman baca lainnya mendasari pembentukan rumah baca desa di Desa Wanogara Wetan oleh Tim kita. Kesadaran mengenai pentingnya mengenalkan budaya membaca kepada masyarakat terutama anak usia sekolah serta membangun prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan tersebut, membuat kami, tim mengajukan program pembuatan rumah baca desa awal kepada pemerintah desa. Disambut baik oleh pemerintah setempat, pembuatan perpustakaan desa langsung dimulai sejak tanggal 15 Februari 2019 hingga diresmikan tanggal 7 Maret 2019.

1. Rumah baca

Membaca sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, sehingga kemampuan membaca menjadi tuntutan. Salah satu upaya peningkatan sumber daya

manusia yaitu dengan mendorong tumbuhnya minat belajar masyarakat, dan salah satu ciri terpenting dari masyarakat terpelajar adalah tingginya minat dan kegemaran membaca.

Pengembangan budaya baca merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan masyarakat berpengetahuan, berketerampilan, maju, dan mandiri melalui kegiatan membaca, menulis, berhitung, dan bersastra yang dalam pelaksanaannya melalui media Taman Bacaan Masyarakat. Adanya TBM diharapkan mampu untuk mendukung pembudayaan kegemaran membaca masyarakat dan sebagai wadah pembinaan aksarawan baru untuk meningkatkan kemampuan keaksaraannya yang telah diperoleh dari keikutsertaan pada program pendidikan keaksaraan sebelumnya. Adanya media TBM ini mampu memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kegemaran membaca dan belajar sebagai penunjang terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat

Buku untuk Wanogara Wetan

Donasi Buku Donasi Ilmu

Buku Pendidikan/Perkembangan Anak

Buku Cerita (SD, SMP) Masih Layak Baca

Buku Pengetahuan (SD, SMP, SMA)



Donasikan bukumu ke: Ds. Wanogara Wetan RT 03/02, Kec. Rembang, Kab. Purbalingga.

Donasi boleh dalam bentuk lain (rak buku atau sejenisnya)

More Info: 082324498412 (Anggi), 085642232603 (Maul)

Pembuatan rumah baca ini dimulai dengan melakukan penggalangan donasi buku, dengan cara membuat poster terkait donasi dan berbagai jenis buku yang dapat didonasikan. Kegiatan donasi ini berjalan selama kurang lebih 3 minggu. Dari hasil donasi, buku yang terkumpul cukup banyak, meliputi buku pengetahuan, buku sekolah, novel, komik, hingga buku dongeng untuk anak usia dini.



Setelah melakukan penggalangan donasi buku, kami mulai melakukan persiapan tempat hingga dekorasi serta penyusunan buku-buku yang sudah terkumpul sebelumnya, setelah itu dilakukan peresmian bersama perangkat desa dan dibuka untuk masyarakat desa. Para siswa pun cukup antusias mendatangi rumah baca desa untuk membaca buku di sana.



Rumah baca ini terletak persis disebelah balai desa, dengan fasilitas yang cukup memadai, diantaranya sudah terdapat meja serta kursi (meski masih terbatas) untuk membaca diharapkan dapat menambah minat baca dari masyarakat setempat. Dalam pembuatan rumah baca desa Wanogara Wetan ini, mahasiswa juga dibantu oleh perangkat desa dan masyarakat setempat. Rumah baca ini masih membutuhkan banyak perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

C. Pemberdayaan Masyarakatat Tentang Pengelolaan Sampah

Sampah hingga saat ini masih menjadi suatu isu yang selalu mengemuka di masyarakat dan perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, tak terkecuali masyarakat desa. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya potensial yang perlu dimanfaatkan.

Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan: (1) memberikan cara pengelolaan sampah limbah rumah tangga organik menjadi kompos bagi masyarakat desa Wanogara Wetan; (2) menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui pengelolaan sampah limbah rumah tangga menjadi kegiatan produktif yang menghasilkan kompos. Metode yang digunakan dalam kegiatan PPM ini adalah melalui pelatihan dengan beberapa tahapan, meliputi: (1) kegiatan diberikan secara teori dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab; (2) peserta diberikan pelatihan secara langsung melakukan praktik, dengan cara dibimbing dan dilatihkan oleh TIM, baik kelompok maupun secara mandiri, dan dilanjutkan tanya jawab dan diskusi; (3) evaluasi kegiatan, dari persiapan hingga akhir kegiatan. Hasil kegiatan ini adalah bahwa (1) cara melakukan pengelolaan sampah limbah rumah tangga organik dapat dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang memiliki komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat sebagai kegiatan produktif; (2) masyarakat telah mengenal dengan baik dan bisa memanfaatkan secara benar dan tepat pengolahan sampah limbah rumah tangga organik menjadi kompos sebagai kegiatan yang produktif; (3) telah tumbuh kepedulian masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah limbah rumah tangga menjadi kegiatan produktif yang menghasilkan kompos.

1. Bank sampah



Bank pengelolaan sampah menciptakan cara pengelolaan yang baru yaitu menggunakan pendekatan melalui reduce, reuse, dan recycle (batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah) yang selanjutnya disebut 3R, adalah segala aktivitas yang mengurangi sampah, penggunaan kembali sampah untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain dan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru. Sampah tidak lagi dipandang barang tidak berguna.

Bank sampah yang dirintis di desa Wanogara Wetan ini memiliki program untuk mensejahterakan masyarakat melalui pengelolaan sampah menjadi nilai ekonomis bagi kehidupan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dengan cara memanfaatkan sampah melalui program 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) serta perubahan perilaku masyarakat menuju lingkungan desa Wanogara Wetan ber-BSM (bersih, sejuk dan manfaat).



Sedangkan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah: pertama, memilah sampah yang dilakukan oleh masyarakat dan disetorkan ke bank sampah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola sampah; kedua, melakukan daur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos, pupuk olahan tersebut sebagian dijual dan sebagian lagi untuk pupuk tanaman warga. Dari bentuk partisipasi tersebut, mencerminkan adanya indikator pemberdayaan masyarakat di Desa Wanogara Wetan. Indikator pemberdayaan masyarakat tersebut adalah; (1) peningkatan kapasitas individu menjadi mengerti tentang lingkungan; (2) adanya partisipasi masyarakat yang telah memahami aturan lembaga BSM; dan (4) lingkungan Desa Wanogara Wetan yang kondusif.

Dampak sosial dari pengelolaan sampah ini sangat positif, terutama kepada warga di seluruh Desa Wanogara Wetan. Masyarakat yang dulunya menganggap sampah tidak bernilai apapun dan tidak dikelola bahkan dibuang-buang, kini mereka menggunakan sampah untuk

ditabung dan menjadi bernilai ekonomis. Selain lingkungan dan ekonomi, masyarakat juga membiasakan diri dan keluarga untuk hidup bersih dan bergotong royong memilah sampah di luar desanya sendiri.

D. Pemberdayaan Masyarakat Tentang Potensi Hasil Desa

1. Pertanian bawang merah

Produk bawang merah merupakan salah satu penyumbang inflasi terbesar di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah. Karenanya Kabupaten Purbalingga terus menggenjot produktifitas tanaman ini, baik dari sisi produksi maupun penambahan luasan lahan produksinya.

Pengembangan bawang merah di Kabupaten Purbalingga dibantu pemerintah pusat seluas 20 hektar. Yang sudah berkembang bagus di Desa Majatengah Kecamatan Kemangkon, Wanogara Wetan (Rembang), dan Limbasari (Bobotsari). Produksinya mencapai 12 ton per hektar



Pemberdayaan masyarakat berupa pemberdayaan petani bawang merah Desa Wanogara Wetan terhadap kesejahteraan keluarga bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan petani bawang merah dan faktor penghambat, pendukung dalam pemberdayaan petani bawang merah dengan menggunakan deskripsi kondisi secara faktual dan sistematis mengenai pemberdayaan petani bawang terhadap kesejahteraan keluarga. Para petani bawang merah diberdayakan oleh pemerintah setempat dan penyuluh pertanian agar bisa mewujudkan keluarga yang sejahtera. Adapun bentuk pemberdayaan petani bawang merah dalam mewujudkan keluarga sejahtera yaitu, 1) petani bawang merah bergabung dalam kelompok tani, 2) petani bawang merah diberikan pemahaman tentang bertani bawang merah yang baik dan benar. Faktor penghambat pemberdayaan petani bawang merah dalam mewujudkan keluarga sejahtera yaitu , 1) harga yang tidak tetap, 2) kurangnya akses jalan.

Faktor pendukung pemberdayaan petani bawang merah dalam mewujudkan keluarga sejahtera yaitu, 1) iklim dan cuaca yang mendukung, 2) tersedianya lahan yang luas.





2. Produksi Calung

Angklung dan calung, alat music bambu khas Indonesia, Bunyi bernada dengan memanfaatkan rongga adalah suatu bentuk seni yang sudah dikenal lama, misalnya dengan alat tiup yang dikenal di dunia. Alat musik bambu amatlah populer di Nusantara. Dengan angklung, kita menemui jenis seni ini melalui goyangan bambu. Dengan calung, kita menjumpai jenis seni dengan memukul bambu.



Desa Wanogara Wetan merupakan salah satu produksi calung, meskipun masih sedikit produksi angklung dan calung di desa ini, tapi dapat dikembangkan menjadi potensi desa yang cukup bagus. Alat musik calung ini terbuat dari potongan bambu yang diletakkan melintang dan dimainkan dengan cara dipukul. Perangkat musik khas Banyumasan yang terbuat dari bambu wulung mirip dengan gamelan Jawa, terdiri atas gambang barung, gambang penerus, dhendhem, kenong, gong dan kendang. Selain itu, ada juga Gong Sebul dinamakan demikian karena bunyi yang dikeluarkan mirip gong tetapi dimainkan dengan cara ditiup (sebul), alat ini juga terbuat dari bambu dengan ukuran yang besar. Dalam

penyajianya calung diiringi vokalis yang lazim disebut sinden. Aransemen musikal yang disajikan berupa gending-gending Banyumasan, gending gaya Banyumasan, Surakarta-Yogyakarta dan sering pula disajikan lagu-lagu pop yang diarsir ulang. Dalam tradisi calung di Banyumas dapat dilihat beberapa elemen yang terkait dengan tampilan fisik maupun sajian musikalnya. Beberapa elemen penting tersebut antara lain wujud fisik, garap instrumen, tempat sajian, dan garap gendhing. Setiap elemen secara bersama-sama berperan dalam membangun wujud kesenian, dalam arti sebagai sarana ekspresi estetik maupun sebagai bagian dari perjalanan panjang sebuah ragam kebudayaan.



Bambu yang secara jelas sangat banyak fungsi dan kegunaannya seperti pembuatan anyaman, seruling, angklung, calung, perabot rumah tangga, dan masih banyak. Pembinaan kepada masyarakat Desa Wanogara Wetan berupa ketrampilan pembuatan cinderamata berbahan baku dari bamboo berupa calung. Melalui kegiatan ini diharapkan ketrampilan

masyarakat akan lebih meningkat yang pada akhirnya diharapkan mau dan mampu memproduksi kerajinan dari bamboo berupa calung.

E. Pemberdayaan Masyarakat Tentang Potensi Desa Wisata

Potensi keindahan kompleks Bendungan Sitangkil Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang, bakal dikembangkan sebagai salah satu tujuan wisata. Pemerintah desa (Pemdes) dan Karang Taruna desa setempat tengah merintis adanya obyek wisata Kampung Air Soedirman. Pemerintah Desa Wanogara Wetan, Kecamatan Rembang, Purbalingga dan Karang Taruna merintis wilayahnya menjadi desa wisata. Mereka mengandalkan potensi keindahan kompleks Bendungan Sitangkil sebagai salah satu tujuan wisata. Kepala Desa Wanogara Wetan, Joko Sumbodo mengatakan, konsep rintisan wisata ini yaitu obyek wisata Kampung Air Soedirman.

Bendungan yang dibangun tahun 1991/1992, semula hanya dimanfaatkan untuk pertanian yakni untuk mengairi lebih dari 120 hektar lahan pertanian di desa Wanogara Wetan, Wanogara Kulon dan Wlahar. “Nantinya akan dikembangkan wahana pancuran air, perahu air di lokasi bawah bendungan, kemudian perahu karet untuk menyusuri aliran sungai,” jelasnya.

Tak hanya itu, di lokasi tersebut juga akan dibangun jalan di tengah persawahan menuju perbukitan yang ada. Pihaknya optimis, setelah pengembangan itu terwujud, bendung Sitangkil akan menjadi obyek wisata yang luar biasa guna mendukung pengembangan wisata yang ada di wilayah kecamatan Rembang.

1. Gamelan sebagai daya Tarik wisatawan

Di Desa Wanogara Wetan terdapat kesenian berupa gamelan jawa, Gamelan adalah ensemble musik yang biasanya menonjolkan metalofon, gambang, gendang, dan gong. Istilah gamelan merujuk pada instrumennya / alatnya, yang mana merupakan satu kesatuan utuh

yang diwujudkan dan dibunyikan bersama. Kata Gamelan sendiri berasal dari bahasa Jawa gamel yang berarti memukul / menabuh, diikuti akhiran an yang menjadikannya kata benda. Orkes gamelan kebanyakan terdapat di pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok di Indonesia dalam berbagai jenis ukuran dan bentuk ensemble. Di Bali dan Lombok saat ini, dan di Jawa lewat abad ke-18, istilah gong lebih dianggap sinonim dengan gamelan.



Konsep yang diberikan dalam pemberdayaan ini berupa bahwa gamelan dapat dijadikan sebagai daya Tarik wisatawan. Gamelan digunakan sebagai sambutan selamat datang untuk wisatawan yang berkunjung ke desa Wanogara Wetan. Gamelan sebagai sebuah pertunjukan musik tersendiri maupun sebagai pengiring tarian atau seni pertunjukan seperti wayang kulit dan ketoprak. Sebagai sebuah pertunjukan tersendiri, musik gamelan biasanya dipadukan dengan suara para penyanyi Jawa (penyanyi pria disebut wiraswara dan penyanyi

wanita disebut waranggana). Pertunjukan musik gamelan yang digelar kini bisa merupakan gamelan klasik ataupun kontemporer. Gamelan sebagai instrument penarik wisatawan juga bisa dirintis konsep belajar music gamelan bagi pengunjung yang datang ke desa Wanogara Wetan.

2. Pembangunan gapura desa Wanogara Wetan

Gapura adalah suatu struktur berupa pintu masuk atau gerbang ke suatu kawasan atau kawasan. Struktur ini sering dijumpai di Pura dan tempat suci agama Hindu lainnya, karena gapura merupakan unsur penting dalam arsitektur Hindu. Gapura juga sering diartikan sebagai pintu gerbang. Dalam bidang arsitektur gapura sering disebut dengan *entrance*, yang memang diartikan sebagai pintu masuk atau pintu gerbang dalam bahasa Indonesia. Namun *entrance* itu sendiri tidak bisa diartikan sebagai gapura. Gapura juga dapat dijadikan sebagai simbol, dimana simbol yang dimaksudkan disini bisa juga diartikan sebuah ikon suatu wilayah atau area. Secara hirarki sebuah gapura bisa disebut sebagai ikon karena gapura itu sendiri lebih sering menjadi komponen pertama yang dilihat ketika kita memasuki suatu wilayah.



Maksud dari pembangunan gapura ini adalah mendirikan suatu struktur yang dapat menjadi simbol bagi desa Wanogara Wetan, sehingga dapat menjadi ciri khas yang menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat desa Wanogara Wetan terhadap masyarakat luar atau tamu yang datang. Tujuan dari pembangunan gapura ini adalah untuk menandai jalur masuk utama ke dalam desa Wanogara Wetan agar memudahkan masyarakat luar yang hendak berkunjung ke desa Wanogara Wetan. Selain itu tujuannya adalah untuk memberi batasan antara desa Wanogara Wetan dan desa lainnya agar dapat menghindari dari konflik persengketaan lahan. Sasaran yang ingin dicapai adalah masyarakat desa Wanogara Wetan dan juga masyarakat luar yang hendak berkunjung atau sekedar melewati desa Wanogara Wetan.



Pada akhirnya, dengan pembangunan gapura desa Wanogara Wetan ini diharapkan masyarakat lebih mengenal Desa Wanogara Wetan sebagai desa wisata yang ramah dan asri sehingga meningkatkan jumlah wisatawan yang mengunjungi berbagai lokasi wisata yang berada di desa ini.



3. Pemberdayaan Masyarakat Bersama Pokdarwis Desa Wanogara Wetan

Maksud dan tujuan pemberdayaan masyarakat terhadap pokdarwis desa Wanogara Wetan

Maksud :

1. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di desa wanogara wetan.
2. Dapat menjadi motifator dan komunikator masyarakat desa wanogara wetan agar sadar wisata dan memanfaatkan potensi yang ada.
3. Menjadikak masyarakat setempat mau berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan.
4. Berperan aktif membantu pemerintah dalam perwujudan sapta pesona dalam kehidupan masyarakat desa Wanogara Wetan.

Tujuan :

1. Meningkatkan peran dan kontribusi masyarakat desa Wanogara Wetan dalam kegiatan wisata.
2. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa Wanogara Wetan
3. Mengembangkan kepariwisataan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat
4. Memperkenalkan dan melestarikan potensi yang ada di desa Wanogara Wetan
5. Menciptakan masyarakat yang sadar wisata dan menciptakan sapta pesona dalam kehidupan masyarakat desa Wanogara Wetan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan selama ini masih problem based. Padahal ketidak berdayaan masyarakat meliputi segala aspek, selain faktor pendidikan, juga faktor struktural dan sosial serta kondisi lingkungan dan kebijakan – kebijakan yang kurang kondusif untuk menumbuhkan kreativitas dan produktivitas pelaku ekonomi mikro dan usaha kecil menengah dalam mengembangkan potensi lokal.

Untuk memajukan potensi daerah perlu bekal pengetahuan teknologi dan inovasi serta kreativitas kearah agropreneurship dan technopreneurship . Untuk itu perubahan cara berpikir dan bertindak sebagai wirausahawan diperlukan. Mencontoh kegiatan pemberdayaan yang berhasil, maka pemberdayaan masyarakat perlu sejalan dengan kegiatan riset.

B. Saran

Pada era global perlu pemberdayaan yang menyeluruh baik aspek mikro dan makro, baik dari dalam diri maupun dari luar yang melibatkan segenap komponen masyarakat. Adanya kompetensi entrepreneur sangat penting. Diperlukan pula pemimpin yang tidak hanya populis, akan tetapi juga mampu sebagai leader maupun manajer dan memiliki kekuatan moral.

LAMPIRAN

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Endro Tri Susdarwono,S.Pd.,S.H., M.Si.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	-
4	NIDN	0617098202
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Pemalang, 17 September 1982
6	E-mail	Saniscara99midas@gmail.com
7	Nomor HP	081229272296
8	Alamat Kantor	Jl. Raya Pagojengan Km.3 Kec. Paguyangan Kab. Brebes.
9	Mata Kuliah yang diampu	1. Pengantar Ilmu Politik 2. Sistem Politik Indonesia 3. Statistika Sosial 4. Kapita Selekta Komunikasi 5. English for Communication

B. Riwayat Pendidikan

Nama Perguruan Tinggi	S1	S2
	Universitas Dr. Soetomo Universitas Semarang	Universitas Diponegoro
Bidang Ilmu	Pendidikan Matematika Ilmu Hukum	Ilmu Politik
Tahun Masuk-Lulus	2002-2006 2006-2011	2011-2012

C. Foto-foto Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wanogara Wetan





















**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS PERADABAN**

Alamat: Jalan Raya Bagorongan Km. 3 Bagoryongan Cirebon 52276
Telp. (0289) 432032 Fax. (0289) 430003

SURAT TUGAS

Nomor : 112/GA.4/K.LPPM.061042/II/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umi Chabibatus Zahro, M.Pd.I
Jabatan : Ketua LPPM Universitas Peradaban

MENUGASKAN

Nama : Endro Tri Susdarwono
NIDN : 0617098202
Unit Kerja : Fakultas Sosial dan Ilmu Politik

Untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Desa Wanogara Wetan - Upaya Meningkatkan Peran Serta Warga Menuju Masyarakat Madani" yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : 7 Februari 2019 - 7 Maret 2019

Lokasi : Wanogara Wetan, Kec. Rembang, Kab. Purbalingga.

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bumirejo, 3 Februari 2019
Ketua LPPM Universitas Peradaban


Umi Chabibatus Zahro, M.Pd.I

Telex dilaksanakan,

Pada : 7 Februari 2019 - 7 Maret 2019

Di W... Wetan,
Wanogara Wetan
Kec. Rembang Kab. Purbalingga



DAFTAR HADIR

Pemberdayaan Masyarakat Desa Wanegara Wajan:
Urasi Meningkatkan Peran Serta Warga Memiliki Masyarakat Mandiri

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Suparno	
2.	SUDRAJAT	
3.	sandi	
4.	PRU	
5.	Ruri	
6.	Larmi	
7.	gaya	
8.	SumbalDa	

1. Edi Prasetyo Bhatti
2. Iqbal Taufiq
3. Syarif Miftah
4. Ulfa Dzaki Diana
5. Hango Supriyanto
6. Abdul Aziz
7. Juni Praditya Wani
8. Finarso
9. Hanga Ari Pratomo
10. Postha Prota R.
11. Aisy Azzah
12. Gunter Aji

1. Ja
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

MODUL MATERI
**“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA WANOGARA WETAN :
UPAYA MENINGKATKAN PERAN SERTA WARGA MENUJU
MASYARAKAT MADANI”**



Disusun Oleh:

ENDRO TRI SUSDARWONO, S.Pd., S.H. M.Si.

NIDN: 0617098202

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM)
UNIVERSITAS PERADABAN
2019**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tak henti kami panjatkan kepada Allah SWT, maha segala dan pemberi nikmat ke sekalian Alam, atas berkat Rahmat dan anugerahNya telah memberikan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan Modul materi pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Desa Wanogara Wetan : Upaya Meningkatkan Peran Serta Warga Menuju Masyarakat Madani” sebagai bukti pengalaman dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terlaksana dengan baik dan berhasil atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Yahya A. Muhaimin selaku Rektor Universitas peradaban
2. Segenap perangkat desa Pemerintahan Desa Wanogara Wetan, Ketua Karang Taruna Desa Wanogara Wetan, dan Pokdarwis Desa Wanogara Wetan
3. Segenap Bapak/Ibu Dosen Universitas peradaban

Semoga segala bantuan dan perhatian Bapak/Ibu sekalian menjadi Amal saleh dan dapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Bumiayu, 10 April 2019

Penulis

BAB I

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1.1. Pendahuluan

Pembangunan selama ini dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan yang menerima semua program dari pemerintah. Paradigma lama (pembangunan) yang lebih berorientasi pada negara dan modal berubah menjadi paradigma baru (pemberdayaan) lebih terfokus pada masyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara partisipatif. Modal dalam paradigma pembangunan lama harus dipupuk terus meski harus ditopang dengan pengelolaan politik secara otoritarian dan sentralistik, sebaliknya pemberdayaan adalah pembangunan yang dibuat secara demokratis, desentralistik dan partisipatoris. Masyarakat menempati posisi utama yang memulai, mengelola dan menikmati pembangunan. Negara adalah fasilitator dan membuka ruang yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa, partisipasi dan institusi lokal.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi ruang untuk dipraktikkan pada paradigma baru dalam pembangunan desa di Indonesia. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya agar desa mempunyai kemampuan sendiri dalam membangun desanya. Paradigma pembangunan yang dilakukan sendiri oleh Desa dikenal dengan istilah “Desa Membangun”. Paradigma Desa Membangun sudah dipraktikkan oleh desa yang mempunyai *agent of change* (AC) terutama pada struktur pemerintah desa. Hal ini karena AC dapat langsung memberikan masukan ataupun arahan bagi pembangunan desanya. Berkaca dari hal tersebut diperlukan stakeholder lain yang dapat juga berfungsi sebagai AC. Oleh karena itu diperlukan upaya pengembangan masyarakat untuk memunculkan keberdayaan desa dalam usaha peningkatan kualitas hidup dan ekonomi masyarakatnya. Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak hanya bertumpu pada pemerintah tetapi juga stakeholder lain seperti *Non Government Organization* (NGO), Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat desa sendiri.



Modul pemberdayaan masyarakat desa dimaksudkan untuk menyediakan pengetahuan tentang pemberdayaan pada masyarakat desa dalam kerangka UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Isi modul pemberdayaan masyarakat desa mencakup pengertian pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam bingkai undang-undang desa, dan praktik baik pemberdayaan masyarakat yang pernah dilakukan oleh mahasiswa.

2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan tidak mempunyai pengertian model tunggal. Pemberdayaan dipahami sangat berbeda menurut cara pandang orang maupun konteks kelembagaan, politik, dan sosial-budayanya. Ada yang memahami pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Ada pihak lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas.

Ada juga yang memahami pemberdayaan secara makro sebagai upaya mengurangi ketidakmerataan dengan memperluas kemampuan manusia (melalui, misalnya, pendidikan dasar umum dan pemeliharaan kesehatan, bersama dengan perencanaan yang cukup memadai bagi perlindungan masyarakat) dan memperbaiki distribusi modal-modal yang nyata (misal lahan dan akses terhadap modal). Berdasarkan hal itu maka inti dari pemberdayaan adalah:

1. Suatu upaya atau proses pembangunan yang berkesinambungan, yang berarti dilaksanakan secara terorganisir, dan bertahap dimulai dari tahap permulaan hingga tahap kegiatan tindak- lanjut dan evaluasi (*follow-up activity and evaluation*).
2. Suatu upaya atau proses memperbaiki (*to improve*) kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
3. Suatu upaya atau proses menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip *to help the community to help themselves* dapat menjadi kenyataan.
4. Suatu upaya atau proses memandirikan masyarakat, dengan cara menggalang partisipasi aktif dalam masyarakat berupa bentuk aksi bersama (*group action*) di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Jadi, pemberdayaan masyarakat desa dapat dipahami dengan beberapa cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Kedua, titik pijak pemberdayaan adalah kekuasaan (*power*), sebagai jawaban atas ketidakberdayaan (*powerless*) masyarakat. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini berasumsi bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah. Kekuasaan

sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian diatas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi, kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti itu, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: (1) bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun; dan (2) bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis (Edi Suharto, 2005).

Ketiga, pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal. Dari sisi proses, masyarakat sebagai subyek melakukan tindakan atau gerakan secara kolektif mengembangkan potensi-kreasi, memperkuat posisi tawar, dan meraih kedaulatan. Dari sisi visi ideal, proses tersebut hendak mencapai suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai kemampuan dan kemandirian melakukan *voice*, akses dan kontrol terhadap lingkungan, komunitas, sumberdaya dan relasi sosial-politik dengan negara. Proses untuk mencapai visi ideal tersebut harus tumbuh dari bawah dan dari dalam masyarakat sendiri. Namun, masalahnya, dalam kondisi struktural yang timpang masyarakat sulit sekali membangun kekuatan dari dalam dan dari bawah, sehingga membutuhkan “intervensi” dari luar.

Hadirnya pihak luar (pemerintah, NGOs, organisasi masyarakat sipil, organisasi agama, perguruan tinggi, dan lain-lain) ke komunitas bukanlah mendikte, menggurui, atau menentukan, melainkan bertindak sebagai fasilitator (katalisator) yang memudahkan, menggerakkan, mengorganisir, menghubungkan, memberi ruang, mendorong, membangkitkan dan seterusnya. Hubungan antara komunitas dengan pihak luar itu bersifat setara, saling percaya, saling menghormati, terbuka, serta saling belajar untuk tumbuh berkembang secara bersama-sama.

Keempat, pemberdayaan terbentang dari level psikologis-personal (anggota masyarakat) sampai ke level struktural masyarakat secara kolektif. Sasaran pemberdayaan adalah masyarakat, yang di dalamnya mewadahi warga secara individual maupun komunitas secara kolektif. Pemberdayaan adalah upaya membangkitkan kekuatan dan potensi masyarakat yang bertumpu pada komunitas lokal melalui pendekatan partisipatif dan belajar bersama. Dari sisi strategi, pendekatan dan proses, pemberdayaan merupakan gerakan dan pendekatan berbasis masyarakat lokal maupun bertumpu pada kapasitas lokal, yang notabene bisa dimasukkan ke dalam kerangka pembaharuan menuju kemandirian masyarakat.

Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah memajukan kemampuan masyarakat desa untuk mengelola secara mandiri urusan komunitasnya. Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, UU Desa menempatkan kesepakatan bersama seluruh warga desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola kewenangannya untuk mengurus dan mengatur Desa.

Pemberdayaan masyarakat memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik. Politik dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini merupakan transformasi politik ke dalam tindakan nyata, khususnya demokrasi hadir dalam hidup sehari-hari. Melalui penerapan demokrasi musyawarah mufakat setiap warga desa

berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai konteks hidupnya masing-masing. Dengan demikian, demokrasi memberi ruang bagi anggota masyarakat dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 1 Ayat (12)

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

2.2 Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan memang sebuah proses. Akan tetapi dari proses tersebut dapat dilihat dengan indikator-indikator yang menyertai proses pemberdayaan menuju sebuah keberhasilan. Untuk mengetahui pencapaian tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberhasilan yang dapat menunjukkan seseorang atau komunitas berdaya atau tidak. Dengan cara ini kita dapat melihat ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberhasilan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan, dan kemampuan kultur serta politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: 'kekuasaan di dalam' (*power within*), 'kekuasaan untuk' (*power to*), 'kekuasaan atas' (*power over*) dan 'kekuasaan dengan' (*power with*). Dari beberapa dasar tersebut, berikut ini sejumlah indikator yang dapat dikaitkan dengan keberhasilan dari pemberdayaan:

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendiri.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, shampo, rokok, bedak). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin orang lain termasuk pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang dengan menggunakan uangnya sendiri.
3. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator diatas, point tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin dari orang lain, terlebih jika ia dapat membeli dengan uangnya sendiri.
4. Terlibat dalam membuat keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama (suami/istri) mengenai keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ternak, memperoleh kredit usaha.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya, yang melarang mempunyai anak, atau melarang

bekerja di luar rumah.

6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul isteri; isteri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya (Edi Suharto, 2005).

2.3 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya agar masyarakat berdaya maka memerlukan intervensi. Ada beberapa tahapan intervensi yang direncanakan agar tercapai keberhasilan pemberdayaan tersebut. Tahapan yang dilakukan lebih dekat sebagai upaya pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat yang dilakukan diharapkan berujung pada terrealisasinya proses pemberdayaan masyarakat (Zubaedi, 2007). Menurut (Adi, 2013) tahapan dalam proses pengembangan masyarakat, yaitu:

1) Tahap persiapan (*engagement*)

Tahap persiapan dalam kegiatan pengembangan masyarakat terdiri dua hal, yaitu persiapan petugas dan persiapan lapangan. Persiapan petugas diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim sebagai pelaku perubahan mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan persiapan lapangan dilakukan melalui studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara formal maupun informal. Bila sudah ditemukan daerah yang ingin dikembangkan, petugas harus mencoba menerobos jalur formal untuk mendapat perizinan dari pihak terkait. Di samping itu, petugas juga harus menjalin kontak dengan tokoh-tokoh informal agar hubungan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik.

2) Tahap pengkajian (*assessment*)

Proses pengkajian yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang diekspresikan dan sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Masyarakat dilibatkan secara aktif agar permasalahan yang keluar adalah dari pandangan mereka sendiri, dan petugas memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang mereka sampaikan. Hasil pengkajian ini akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya, yaitu tahap perencanaan.

3) Tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*)

Pada tahap ini petugas secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi, bagaimana cara mengatasinya serta memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

4) Tahap formulasi rencana aksi (*formulation action plan*)

Pada tahap ini petugas membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengadaptasi permasalahan yang ada.

Pada tahap ini diharapkan petugas dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

5) Tahap implementasi kegiatan (*implementation*)

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat, maupun kerjasama antarwarga.

6) Tahap evaluasi (*evaluation*)

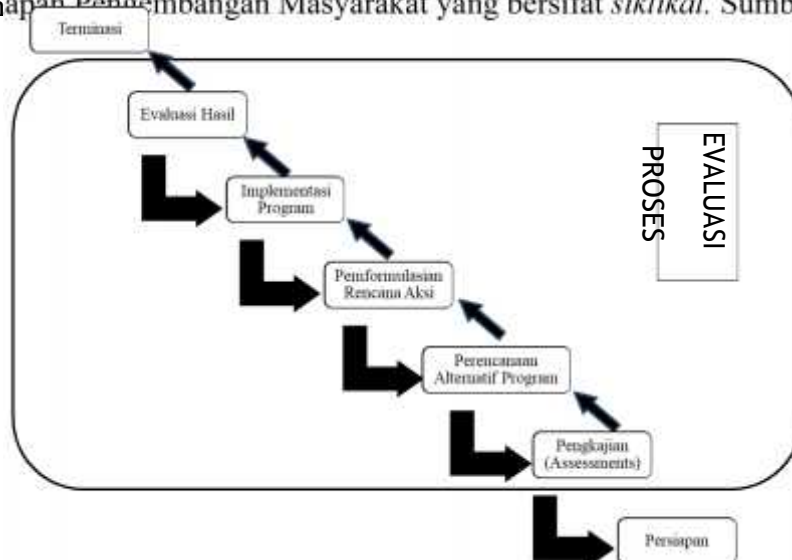
Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Pada tahap ini sebaiknya melibatkan warga untuk melakukan pengawasan secara internal agar dalam jangka panjang diharapkan membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan.

7) Tahap terminasi (*termination*)

Tahap ini merupakan tahap ‘perpisahan’ hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan program tersebut.

Ketujuh tahapan intervensi di atas merupakan proses *siklikal* yang dapat berputar guna mencapai perubahan yang lebih baik, terutama setelah dilakukan evaluasi proses (monitoring) terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada. Siklus juga dapat berbalik di beberapa tahapan yang lainnya, misalnya ketika akan memformulasikan rencana aksi, ternyata petugas dan masyarakat merasakan ada keanehan atau perkembangan baru di masyarakat sehingga mereka memutuskan untuk melakukan pengkajian kembali (*reassessment*) terhadap apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena keluwesan-keluwesan ini maka dalam tahap pengembangan masyarakat dikatakan bersifat *siklikal* atau siklus spiral seperti

Gambar 1. Tahapan Pengembangan Masyarakat yang bersifat *siklikal*. Sumber: Adi (2013)



2.4 Pelaku Perubahan

Di dalam sebuah proses pemberdayaan memerlukan pelaku perubahan (*agent of change*) yang berperan sebagai animator sosial agar proses pemberdayaan berjalan terus. Pelaku perubahan mempunyai peran sebagai *community worker* atau *enabler* (Ife dalam Adi, 2013). Seorang *community worker* harus memiliki keterampilan sebagai berikut:

- a. Keterampilan fasilitatif
Seorang pelaku perubahan harus mempunyai peran sebagai animator sosial, mediasi dan negosiasi, pemberi dukungan, membentuk konsensus, memfasilitasi kelompok, memanfaatkan sumberdaya dan keterampilan, dan mengorganisir.
- b. Keterampilan edukasional
Seorang pelaku perubahan juga harus mempunyai peran untuk membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, mengkonfrontasikan, dan melatih.
- c. Keterampilan perwakilan
Pada posisi ini seorang pelaku perubahan diharapkan mempunyai peran dapat mencari sumber daya, advokasi, memanfaatkan media, membuat hubungan masyarakat, mengembangkan jaringan, dan membagi pengetahuan kepada masyarakat.
- d. Keterampilan teknis
Adapun keterampilan teknis meliputi keterampilan untuk melakukan riset, menggunakan komputer, melakukan presentasi tertulis maupun verbal, serta kemampuan untuk mengontrol dan mengelola keuangan.

Sedangkan Menurut Zastrow (2010) terdapat peran yang dapat dilakukan oleh *community worker* dalam membantu individu, kelompok, keluarga, organisasi serta masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Seorang *community worker* diharapkan memiliki pengetahuan dan terampil dalam mengisi berbagai peran. Peran tertentu yang dipilih seharusnya ditentukan oleh apa yang akan menjadi paling efektif, peran- peran tersebut antara lain:

1. *Enabler* (pemungkin), merupakan peran untuk membantu individu atau kelompok untuk mengartikulasi atau menyatakan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah mereka, mencari strategi pemecahan masalah, serta memilih dan menerapkan strategi guna mengembangkan kapasitas mereka dalam menangani masalah secara efektif.
2. *Broker* (penghubung), merupakan peran yang menghubungkan individ-individu dan kelompok yang perlu bantuan dan yang tidak tahu dimana bantuan tersebut bisa di dapat dari pelayanan masyarakat.
3. *Advocate* (pembela), merupakan peran memberikan kepemimpinan dalam mengumpulkan informasi, mengargumentasikan kebenaran, kebutuhan, dan permintaan klien. Hal tersebut dilakukan apabila seorang klien atau kelompok sedang membutuhkan bantuan. Advokasi sebagai aktivitas menolong klien untuk mencapai layanan ketika mereka ditolak suatu lembaga.
4. *Empower* bertujuan untuk membantu individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat meningkatkan pribadi mereka, interpersonal, sosial ekonomi, dan kekuatan politik.
5. *Activist* (aktivis), merupakan peran melakukan perubahan institusional, mereka peduli dengan ketidakadilan, ketidakmerataan, dan kemiskinan sosial. Taktik yang mereka gunakan berupa konflik, konfrontasi, dan negosiasi.

6. *Mediator* (penengah), merupakan peran melakukan intervensi jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Hal ini untuk membantu mereka dalam mencapai kompromi, merekonsiliasi perbedaan, dan mencapai kesepakatan bersama.
7. *Negotiator* (penegosiasi), merupakan peran menyatukan mereka yang sedang berkonflik dengan suatu isu, berupaya menawarkan dan mendapatkan kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak.
8. *Educator* (pendidik/instruktur), merupakan peran memberikan informasi kepada klien. Mengajar mereka dengan berbagai keterampilan.
9. Initiator (insiator atau penginisiatif), merupakan peran seorang *community worker* mengetahui potensi masalah dan mampu memberikan solusi.
10. *Coordinator* (koordinator), merupakan peran menyatukan beberapa komponen secara bersama, dengan cara yang terorganisir.
11. *Reseracher* (peneliti), merupakan peran melakukan studi literatur terhadap berbagai topik penelitian.
12. *Group facilitator* (fasilitator kelompok), *community worker* sebagai pemimpin dalam kelompok.
13. *Public speaker* (juru bicara), merupakan peran berbicara di depan khalayak untuk menginformasikan berbagai pelayanan yang tersedia dan meminta dukungan bagi pelayanan baru.

Upaya mengembangkan masyarakat di dalam sebuah komunitas oleh pelaku perubahan melibatkan tenaga pendamping (*fieldworker*) dan tenaga kader lokal (*indigenous worker*). Kader lokal berasal dari masyarakat yang ikut secara sukarela dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan ikut bertanggungjawab dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Adi, 2013). Hal ini sangat penting karena ketika sudah mencapai tahap terminasi, pemberdayaan tersebut akan diteruskan oleh kader pemberdayaan lokal. Kader pemberdayaan lokal sebaiknya juga mempunyai peran ataupun keterampilan yang disampaikan oleh Jim ife maupun Zastrow. Memang peran atau keterampilan itu tidak dapat langsung dikuasai oleh kader pemberdayaan lokal, akan tetapi dapat dipelajari oleh pelaku perubahan yang ada.

2.5 Pemberdayaan Masyarakat dalam bingkai UU Desa

Dasar Hukum Pemberdayaan Desa Masyarakat

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 1 disebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan Desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 undang-undang tersebut, sebagai berikut bahwa Desa merupakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika". Ketentuan di atas menegaskan kedudukan Desa sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah.

UU Desa membentuk tatanan desa sebagai penggabungan fungsi *self-governing community*

dan *local self-government*. *Self governing community* masyarakat adat yang memiliki pemerintahan sendiri yang khas dan tidak terikat dengan pemerintahan yang lain. Sedangkan *local self government* yaitu pemerintah desa yang mempunyai kedudukan dan kewenangan yang identik dengan daerah otonom, serta mempunyai hak dan peluang untuk mengembangkan diri dan mengejar ketinggalan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan setempat yang positif dan kondusif. Dengan asas dimana pemerintah desa maupun masyarakat adat mempunyai hak dan peluang untuk mengembangkan diri mereka sendiri yang merupakan inti dari pemberdayaan. Pemerintah dalam mengatur desa dengan UU Desa Pasal 4 mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, desa sebagai sebuah pemerintahan dapat melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat desa.

Pengertian dan Lingkup Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 12 didefinisikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pada pasal 67 ayat 2 juga menyebutkan bahwa desa berkewajiban untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun masyarakat desa berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi, dan mengawasi serta menyampaikan aspirasi mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa (pasal 68 ayat 1).

Pemerintah desa di dalam program pembangunan diharuskan melakukan pemberdayaan masyarakat. Apabila pemerintah desa tidak melakukan program pemberdayaan, maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya untuk mendorong terciptanya program pemberdayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Desa dapat mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat (pasal 94 ayat 1). Contoh lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, Dasawisma, lembaga keagamaan, lembaga budaya, atau lembaga ekonomi.

Adapun pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah baik Provinsi atau Kabupaten memberdayakan masyarakat dengan a) menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa; b) meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan c) mengakui dan memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarakat desa. Ketiga intervensi dari pemerintah tersebut dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan (pasal 112 ayat 3 dan 4).

Pada tingkat kawasan perdesaan, program pemberdayaan desa dimaksudkan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi (pasal 83 ayat 3). Program kerjasama antar-Desa pada tingkat kawasan dapat diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan (pasal 92 ayat 1 huruf b).

Lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 pada pasal 6 meliputi:

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan,
- b. pelatihan teknologi tepat guna,
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; dan
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - kelompok usaha ekonomi produktif;
 - kelompok perempuan,
 - kelompok tani,
 - kelompok masyarakat miskin,
 - kelompok nelayan,
 - kelompok pengrajin,
 - kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - kelompok pemuda; dan
 - kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan ini menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan juga merupakan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.

Prinsip dan Asas Pemberdayaan Masyarakat Desa

UU Desa membentuk tatanan desa sebagai penggabungan fungsi *self-governing community* dan *local self-government*. Tatanan itu diharapkan mampu mengakomodasi kesatuan masyarakat hukum yang menjadi fondasi keragaman NKRI. Lebih-lebih pengaturan desa dalam UU Desa berlandaskan pada asas yang meliputi:

- a. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- b. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa;
- c. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun desa;
- e. Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa;
- f. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
- g. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- h. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

diakui, ditata, dan dijamin;

- i. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- j. Partisipasi, yaitu warga desa turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- k. Kesetaraan, yaitu kesamaan warga desa dalam kedudukan dan peran;
- l. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;

- m. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

BAB II

PRAKTIK PEMBERDAYAAN DI DESA WANOGARA WETAN

2.1 Perencanaan Partisipatif dalam Mewujudkan Peran Serta Warga Menuju Masyarakat Madani di Desa Wanogara Wetan

Pemerintahan Desa Wanogara Wetan bekerjasama dengan Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Peradaban telah melaksanakan program pengabdian masyarakat Desa Wanogara Wetan dengan menekankan pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kegiatan pengabdian melalui pemberdayaan masyarakat yang berhasil dalam membangun partisipasi warga diantaranya adalah melalui rumah baca (perpustakaan desa), bank sampah, pemberdayaan potensi hasil desa dan pemberdayaan wisata di Desa Wanogara Wetan, Kabupaten Purbalingga. Proses pengembangan masyarakat yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, pada tahap ini Tim melakukan konsolidasi di dalam tim untuk menyamakan persepsi tentang pengembangan rumah baca dan bank sampah. Selain itu Tim juga mengurus izin yang berkaitan dengan rumah baca dan bank sampah seperti ke kepala desa, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, serta calon pengelola rumah baca dan bank sampah.
2. Tahap pengkajian, Tim mengidentifikasi masalah atau kebutuhan serta sumber daya dalam pengembangan rumah baca dan bank sampah. Masyarakat terlibat dalam merumuskan kebutuhan dan sumberdaya rumah baca dan bank sampah. Kemudian disusun prioritas kegiatan yang akan dilakukan dalam pengembangan rumah baca dan bank sampah.
3. Tahap Perencanaan alternatif, pada tahap ini Tim dan masyarakat juga menyusun program alternatif apabila program perencanaan utama tidak berjalan, yaitu program pemberdayaan hasil desan dan pemberdayaan Desa Wanogara Wetan sebagai rintisan desa wisata.
4. Tahap Rencana aksi, pada tahap ini Tim membantu kelompok masyarakat yang akan mengelola rumah baca dan bank sampah untuk membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya. Misalnya bagaimana mendapatkan tambahan koleksi buku.
5. Tahap implementasi, pada tahap ini Tim serta pengelola rumah baca dan bank sampah menggalang dukungan masyarakat atau kelompok yang telah berkomitmen dalam rumah baca dan bank sampah. Misalnya dalam pemugaran rumah baca dan pembaharuan bank sampah, diperlukan bantuan dari Kepala Desa dan kelompok masyarakat, juga kerjasama antar warga. Warga desa atau pemuda terlibat dalam merenovasi rumah baca dan pembaharuan bank sampah yang telah ada agar menjadi lebih menarik, melalui pengecatan dan dekorasi mural pada rumah baca dan penyegaran untuk bank sampah. Kegiatan renovasi dan dekorasi ini berlangsung sekitar 2 pekan. Kemudian dilaksanakan perapihan dan penyusunan buku ke dalam rak buku (katalogisasi buku) yang merupakan sumbangan dari beberapa donatur.

Setelah itu sebagai wujud dukungan formal, dilaksanakanlah *launching* rumah baca

dengan rangkaian agenda, sambutan dari beberapa undangan, dilanjutkan dengan pemotongan pita pada peresmian rumah baca, Pembacaan SK Pengurus rumah baca. Pelaksanaan kegiatan tidak berhenti sampai dengan *launching*, juga dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain kegiatan Bedah Buku dan Sharing Inspirasi Gemar Membaca oleh Penggerak Literasi Pustaka rumah baca bersama para pemuda. Kegiatan berlanjut dengan pelatihan penyusunan proposal kegiatan di dalam ruang rumah baca yang difasilitasi oleh salah satu Tim dengan tujuan pengurus rumah baca dapat lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan kedepannya, utamanya dalam hal mengusulkan kegiatan dan dukungan pembiayaan kepada pihak desa. Tim juga menginisiasi pembentukan jaringan kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dengan rumah baca.

6. Tahap evaluasi, Organisasi atau kelompok pengurus rumah baca dan bank sampah yang telah dibentuk akan menjalankan dan mengawasi program yang telah disepakati. Dalam melakukan evaluasi warga desa dilibatkan agar terjadi pengawasan secara internal dan eksternal sehingga terbentuk sistem pengawasan untuk program rumah baca dan bank sampah. Contohnya melalui rapat bersama pemuda dengan agenda sosialisasi rumah baca dan bank sampah, serta pembentukan kepengurusan dan sistem evaluasinya.
7. Tahap terminasi. Meskipun program pengabdian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Wanogara Wetan, sudah selesai dalam arti waktu yang dialokasikan untuk kegiatan sudah berakhir, kelompok (rumah baca dan bank sampah) dan pemerintah desa sepakat agar mahasiswa Tim dapat terus membantu pengembangan rumah baca dan bank sampah. Melalui program kerja rumah baca dan bank sampah telah berhasil membentuk kader lokal (*agent of change*) yang berasal dari kalangan pemuda. Keberadaan kader lokal sangat penting agar program rumah baca dan bank sampah dapat terus berjalan dan berkembang.



Foto Pembahasan Rumah Baca dan Bank Sampah

Praktik terbaik yang muncul dalam perencanaan partisipatif dalam mewujudkan rumah baca dan bank sampah adalah peningkatan kesediaan masyarakat desa terlibat secara aktif merumuskan kebutuhan dan memetakan sumberdaya untuk pengembangan rumah baca dan bank sampah Desa Wanogara wetan. Jadi masyarakat terlibat langsung dalam perencanaan sampai dengan tahap evaluasi kegiatan dengan membentuk kepengurusan rumah baca dan bank sampah untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah dirintis oleh tim mahasiswa .

BAB III PENUTUP

Secara umum pembangunan desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui partisipasi dan komitmen masyarakat sebagai sebuah komunitas. Pembangunan desa tersebut menekankan pada pentingnya pemberdayaan masyarakat desa.

Pentingnya model pembangunan yang berbasis masyarakat (*community based development*) didasari oleh pengalaman bahwa model pembangunan yang bersifat top down sering gagal dalam menuntaskan kemiskinan dan adanya ketidakmampuan masyarakat terhadap tekanan struktural yang disebabkan oleh model pembangunan pertumbuhan yang mengabaikan aspek dalam masyarakat. Pembangunan dengan model pemberdayaan ini akan mendorong terbentuknya struktur masyarakat yang lebih berdaya dan mempunyai ketahanan (*resilience*) terhadap setiap tekanan dengan membuat regulasi yang berpijak pada prinsip keadilan dan inklusif.

Pemberdayaan itu merupakan kewajiban pemerintah desa, di sisi lain masyarakat dapat menyampaikan aspirasi yang mendorong terciptanya program pemberdayaan serta mengawasi jalannya program tersebut. Aspirasi dan keikutsertaan masyarakat dalam program pemberdayaan ini merupakan bentuk partisipasi dan komitmen sebagai sebuah kelompok untuk membangun desa.

Pendekatan pemberdayaan sebagai suatu proses sangat cocok dalam program Pemberdayaan Masyarakat yang diadakan oleh Universitas. Hal ini karena program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Wanogara Wetan menekankan pada kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan desa. Tim yang terdiri dari Mahasiswa dari beberapa Prodi diharapkan memberikan landasan dan kesadaran akan arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam dalam pembangunan desa. Hal ini untuk mempercepat keberdayaan dan kemandirian desa dalam menghadapi tantangan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2013). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Alinsky, Saul D. (1971). *Rules for Radicals A Practical Primer for Realistic Radicals*. New York: Vintage Books.
- Breton, Margot. (1994). *On the Meaning of Empowerment and Empowerment-Oriented Social Work Practice: Social Work with Groups*.
- Chambers, Robert. 1983. *Rural Development Putting the Last First*. Longman Inc.
- Eko, Sutoro (2004). *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press.
- Ife, Jim. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*. Australia: Longman
- Ife, Jim. (2013). *Community Development in an Uncertain World*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Friedman, Jhon, (1992). *Empowerment, The Politics of Alternative Development*, Cambridge Blackwell Publishers
- Green, John.J (2016). *Community Development and Social Development: Informing Concepts of Place and Intentional Social Change in a Globalizing World. Journal Research on Social Work Practice*. Sage Publication
- Midgley, J. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publication.
- Midgley, J. (2014). *Social Development: Theory and Practice*. London: Sage Publication.
- Narayan, Deepa, (2002). *Empowerment and Poverty Reduction*. The World Bank Washington.
- Phillips, Rhonda & Robert H. Pittman (2009). *An Introduction to Community Development*. London & New York: Routledge.
- Riger, Stephanie and Margaret T. Gordon (1981). *The Fear of Rape: A Study in Social Control*. Journal of Social Issue. Volume 37, Issue 4. page 71-92.
- Rozaki, et. al.(2006). *Kaya Proyek Miskin Kebijakan: Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa*. Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta: Yogyakarta.
- Suharto, Edi (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Swift C, Levin G (1987). *Empowerment: An Emerging Mental Health Technology*. USA: J Primary Prevention.

Zimmerman, M.A. and Rappaport, J. (1988). *Citizen Participation, Perceived Control, and Psychological Empowerment*. American Journal of Community Psychology, 16, 725-750.

Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media Group.

Peraturan

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa